



ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER PADA PT. BANK SYARIAH DI INDONESIA

Moh. Adenan*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Desi Dwi Prabaswara Puspita

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

Suparman

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

*Corresponding author, email: mohadenan.feb@unej.ac.id

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia, Bank BSI, is a merger of bank state owned state as Bank Syariah Mandiri, BSM, Bank Negara Indonesia Syariah, BNIS, and Bank Rakyat Indonesia Syariah, BRIS to empower and developsharia economic ecosystem and national halal industry. This study aims to analyze the differences financial performance before and after merger into BSI. This research utilized descriptive comparative financial ratio as follows Capital Adequacy, CAR, Non-Performing Financing, NPF, Return on Assets, ROA, and Short Term Mismatch, STM. The results concluded that the three banks state banks before the merger had categorized good in capital and asset quality, and after the merger they showed an increase so that their capital and asset quality became very good. The average profitability of Sharia banks before the merger was good, except Bank BSM was still not good, then after merger resulted into Bank BSI categorized better profitability. The liquidity of the three banks before the merger was not good, but after the merger, Bank BSI had increased so that it became very good. So the merger into Bank BSI can increase financial performance.

Keywords: *Financial Performance, Sharia Banks, Mergers*

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) merupakan hasil merger bank milik negara Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger menjadi BSI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif rasio keuangan, seperti Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Non-Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), dan *Short Term Mismatch* (STM). Hasil analisis dapat menyimpulkan bahwa ketiga bank BSM, BNIS dan BRIS sebelum merger memiliki permodalan dan kualitas aset baik, kemudian setelah merger permodalan dan kualitas aset menjadi sangat baik. Rasio rentabilitas rata-rata bank syariah sebelum merger tergolong baik kecuali Bank BSM masih kurang baik, kemudian hasil merger Bank BSI semakin baik. Rasio likuiditas ketiga bank sebelum merger tergolong kurang baik namun sesudah merger Bank BSI telah menjadi sangat baik. Dengan demikian secara keseluruhan merger Bank BSI dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Bank Syariah, Merger.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia dan dari total penduduk sekitar 250 juta jiwa terdapat 86,9% dari jumlah penduduk memeluk Agama Islam. Islam adalah agama yang mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam mengatur tentang ekonomi atau harta dan perniagaan (Bayu, 2022). Perbankan Syariah merupakan bentuk pengaturan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat untuk memudahkan transaksi jual beli, menghimpun dan menyalurkan dana serta transaksi keuangan lainnya. Tentunya dalam kegiatan usaha terdapat usaha sejenis yang menawarkan produk perbankan yang "sama" (Ghofur, 2018). Oleh karena itu keberadaan bank syariah akan bersaing dengan sesama bank syariah dan persaingan terberat adalah dengan keberadaan bank konvensional yang telah berdiri jauh lebih lama, memiliki jumlah nasabah, aset, investor dan kepercayaan masyarakat (Alpin, 2021). Di samping bersaing dengan bank-bank di tingkat nasional, bank syariah juga bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperkuat kedudukan dan eksistensi perekonomian syariah secara nasional dan internasional dengan berbagai strategi. Adapun pilihan strategi internal dan eksternal adalah dengan cara merger atau bergabung sesama bank milik negara yang dapat memperkuat daya saing bank Syariah. Perbankan Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Himbara telah melakukan merger adalah PT Bank BRI Syariah Tbk., (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) menjadi Bank Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) (Alpin, 2021).

Alasan dilakukannya merger adalah untuk memajukan dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang menurut pemerintah masih cukup tertinggal. Sedangkan peluang yang dimiliki Indonesia cukup besar karena didominasi oleh masyarakat muslim. Adapun dampak merger adalah dapat meningkatkan modal sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan modal dan mampu meningkatkan jumlah pembiayaan kepada masyarakat. Merger bank syariah tidak hanya untuk bank-bank yang berskala usaha besar saja, tetapi juga untuk bank yang tergabung ada yang berasal dari bank syariah skala usaha.

Pada penelitian sebelumnya masih ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah merger, seperti yang disampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh I. A. G. K. Dewi & Purnawati (2016). Oleh karena itu, sangat menarik dilakukan kajian terkait dengan Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Perbankan syariah diatur di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan di pasal 8 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Antasari & Fauziah, 2018).

Merger

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VIII tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada pasal 122 ayat 1 disebutkan bahwa "Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum". Selain itu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VIII tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan pada pasal 122 ayat 3 disebutkan bahwa pasiva dan aktiva perusahaan yang menggabungkan diri beralih kepada perusahaan yang menerima penggabungan, begitu juga dengan pemegang saham beralih menjadi pemegang saham perusahaan yang menerima penggabungan (F. K. Dewi, 2021).

Terdapat 4 jenis merger (Antasari & Fauziah, 2018), yaitu: a. Merger Konglomerat di mana Perusahaan yang tergabung bukan termasuk kompetitor, pemasok, atau pelanggan terhadap yang lainnya, seperti pada merger vertikal dan horizontal; b. Merger dalam suatu grup, baik tipe

downstream merger maupun tipe *up stream merger* di mana anak perusahaan yang melebur ke dalam induk perusahaan; c. Merger Horizontal dan Vertikal di mana merger horizontal terjadi antar kompetitor dan merger vertikal antara pemasok dengan konsumen, atau distributor dengan pabrik; dan d. Merger Segitiga, merger antar 2 perusahaan, dengan hak kewajiban dan aset yang dimiliki oleh salah satu perusahaan yang bubar dialihkan ke anak perusahaan dari perusahaan yang tetap eksis.

Kinerja Keuangan

Menurut (Fahmi, 2014) kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk mengetahui pelaksanaan perusahaan yang dibuktikan dengan pelaporan keuangan perusahaan yang baik dan benar yang telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ataupun *General Accepted Accounting Principle* (GAAP).

Haryanti (2015) menyebutkan terdapat 5 langkah ketika menganalisis kinerja keuangan yang biasa dilakukan di suatu perusahaan, yaitu: a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan, agar laporan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam dunia akuntansi, sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan; b. Melakukan perhitungan harus sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang sedang dialami sehingga hasil perhitungan tersebut dapat menjadi kesimpulan dari analisis yang dilakukan; c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh di perusahaan lain atau di tahun yang berbeda; d. Melakukan penafsiran terhadap permasalahan yang ditemukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dialami perbankan; dan e. Mencari dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dengan mencari solusi untuk permasalahan yang dialami dengan beberapa masukan yang sesuai agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan.

Laporan Keuangan

Menurut Munawir dalam Wardiyah (2017) laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi sebagai alat untuk mendeskripsikan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Sedangkan menurut Hartono (2018) laporan keuangan ialah informasi gambaran kondisi perusahaan, selanjutnya informasi tersebut menjadi informasi yang mampu mendeskripsikan kinerja perusahaan.

Hanafi & Halim (2016) mengatakan tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang kinerja posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Esterlina & Firdaus (2017) juga menyebutkan tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memudahkan kreditor dan investor serta pengguna lainnya dalam memahami informasi keuangan yang tersaji. Tujuan umum lainnya adalah menghasilkan laporan keuangan secara lengkap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan (Khoiriyah, 2021).

Rasio Keuangan

Rasio dapat didefinisikan yaitu perbandingan jumlah yang satu dengan lainnya untuk dapat diketahui perbandingannya agar mendapat jawaban sebagai bahan analisis yang dapat diputuskan (Ramadhan & Syarfan, 2016). Adapun rasio yang secara khusus digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan setiap perusahaan, yang disebut dengan rasio keuangan atau *financial ratio* (Suryawathy, 2014). Adapun manfaat dari analisis rasio keuangan (Marcelino, 2021) adalah sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan, sebagai rujukan dalam membuat perencanaan oleh pihak manajemen, sebagai alat evaluasi kondisi keuangan terakhir perusahaan, sebagai acuan dalam memperkirakan risiko yang mungkin terjadi, dan bermanfaat bagi para *stakeholder* sebagai penilaian.

Berikut beberapa rasio yang sesuai dengan laporan keuangan perbankan syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah:

a. Faktor Permodalan (*Capital*)

Rasio yang digunakan dalam mengukur faktor permodalan (*capital*) ialah Rasio Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Tujuan dari rasio KPMM adalah menghitung kecukupan modal yang dimiliki dalam meminimalisir kerugian dan memenuhi ketentuan

yang telah berlaku. Rumus KPMM adalah sebagai berikut:

$$KPMM = \frac{M \text{ tier1} + M \text{ tier2} + M \text{ tier3} - \text{Penyertaan}}{ATMR}$$

Hasil dari perhitungan Rasio ini dapat dikategorikan kedalam 5 kriteria penilaian peringkat:

Tabel 1. Peringkat Rasio KPMM

Peringkat	KPMM
1	$KPMM \geq 12\%$
2	$9\% \leq KPMM < 12\%$
3	$8\% \leq KPMM < 9\%$
4	$6\% < KPMM < 8\%$
5	$KPMM \leq 6\%$

Sumber: data primer, 2022

b. Faktor Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Rasio yang digunakan dalam mengukur faktor kualitas aset (*asset quality*) adalah pembiayaan *non performing* (NPF). Tujuan dari rasio NPF adalah mengukur seberapa besar permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Adapun rumus perhitungan rasio NPF adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Pembiayaan *non performing* (NPF) dapat dikategorikan ke dalam 5 kriteria penilaian peringkat:

Tabel 2. Peringkat Rasio NPF

Peringkat	NPF
1	$NPF < 2\%$
2	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	$NPF \geq 12\%$

Sumber: data primer, 2022

c. Faktor Rentabilitas (*Earning*)

Rasio yang digunakan dalam faktor rentabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). Tujuan dari rasio *Return on Asset* (ROA) adalah untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan untuk mengetahui keberhasilan manajemen. Semakin kecil rasio ini menunjukkan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Return on Asset (ROA) dapat dikategorikan kedalam 5 kriteria penilaian peringkat:

Tabel 3. Peringkat Rasio ROA

Peringkat	ROA
1	$ROA > 1,5\%$
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	$ROA \leq 0\%$

Sumber: data primer, 2022

d. Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Rasio yang digunakan dalam faktor likuiditas adalah *Short Term Mismatch* (STM). Tujuan rasio STM ini adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Adapun rumus perhitungan rasio STM adalah sebagai berikut:

$$STM = \frac{\text{Aktiva jangka pendek}}{\text{Kewajiban jangka pendek}}$$

Short Term Mismatch (STM) dapat dikategorikan kedalam 5 kriteria penilaian peringkat:

Tabel 4. Peringkat Rasio STM

Peringkat	STM
1	STM > 25%
2	20% < STM ≤ 25%
3	15% < STM ≤ 20%
4	10% < STM ≤ 15%
5	STM ≤ 10%

Sumber: data primer, 2022

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan atau dapat berupahubungan sebab akibat antara minimal dua variabel. Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data yang digunakan penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan milik BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah pada tahun 2020, serta Bank Syariah Indonesia tahun 2021 yang telah dipublikasikan pada situs resmi www.bankbsi.co.id.

Populasi adalah wilayah general yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan, dapat berupa obyek/subyek dan karakteristik/sifat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Indonesia.

Metode analisis pada penelitian ini yaitu analisis perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah merger. Analisis perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah merger dengan cara membandingkan minimal dua periode laporan keuangan yang digunakan. Analisis perbandingan laporan keuangan digunakan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada periode yang berbeda (Wardiyah, 2017). Perubahan yang terjadi dapat terlihat melalui perbandingan yang dinyatakan dalam rasio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan melakukan perhitungan rasio keuangan yang telah dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rasio yang terdapat di dalam faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.

Kinerja Keuangan Permodalan

Tabel 5. Perhitungan Rasio KPMM

KPMM	Sebelum			Sesudah
	BSM 2020	BRIS 2020	BNIS 2020	BSI 2021
M Tier1&2	10,933,669	6,030,642	5,572,195	25,122,769
Total ATMR	64,774,833	31,667,790	26,088,029	113,747,059
Rasio KPMM	16,88%	19,04%	21,36%	22,09%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 6. Rekapitulasi Perubahan Rasio KPMM

Ket	Sebelum merger	Sesudah Merger(BSI)	Naik/Turun	%
BRIS	19,04%	22,09%	Naik	3,05%
BNIS	21,36%	22,09%	Naik	0,73%
BSM	16,88%	22,09%	Naik	5,21%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan data di atas, Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai bank sebelum merger memiliki rasio KPMM sebesar 16,88% di mana rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sesudah merger dengan rasio KPMM sebesar 22,09%. Perbedaan antara sebelum dengan sesudah merger yaitu sebesar 5,21%.

Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) diperoleh hasil perhitungan rasio sebesar 19,04% atau 3,05% lebih rendah dibandingkan dengan rasio Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sebesar 22,09%.

Pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) diperoleh hasil perhitungan rasio KPMM sebesar 21,36% di mana rasio ini lebih rendah 0,73% dibandingkan rasio sesudah merger pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu sebesar 22,09%.

Tabel 7. Analisis Sinergi Rasio KPMM

Perhitungan Rasio KPMM	Sebelum	Sesudah
M Tier 1&2	22.536.506	25.122.769
Total ATMR	122.530.652	113.747.059
Rasio KPMM	18.39%	22.09%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Rasio sebelum merger yang merupakan penjumlahan dari ketiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) diperoleh sebesar 18,39%. Terjadi peningkatan sebesar 3,7% menjadi 22,09% pada rasio KPMM Bank Syariah Indonesia (BSI) sesudah merger.

Kinerja Keuangan Kualitas Aset

Tabel 8. Perhitungan Rasio NPF

RasioNPF	Sebelum			Sesudah
	BSM 2020	BRIS 2020	BNIS 2020	BSI 2021
kl, d,m	581,850	640,251	445,560	1,350,378
Pembiayaan	79,939,295	38,873,439	33,049,000	168,913,820
RasioNPF	0.73%	1.65%	1.35%	0.80%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 9. Rekapitulasi Perubahan Rasio NPF

	Sebelum merger	Sesudah Merger(BSI)	Naik/Turun	%
BRIS	1.65%	0.80%	Turun	0,85%
BNIS	1.35%	0.80%	Turun	0,55%
BSM	0.73%	0.80%	Naik	0,07%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki rasio NPF sebesar 0,73% dan Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki rasio NPF sebesar 0,80%. Maka rasio NPF sebelum merger pada Bank Syariah Mandiri (BSM) mengalami kenaikan sebesar 0,07% menjadi 0,80% sesudah merger.

Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) tahun 2020 atau sebelum merger memiliki rasio NPF sebesar 1,65% di mana rasio ini lebih tinggi dari rasio sesudah merger pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021 yaitu sebesar 0,80%. Rasio NPF sebelum merger mengalami penurunan sebesar 0,85% menjadi 0,80% pada rasio sesudah merger.

Begitu juga dengan rasio NPF pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) tahun 2020 atau periode sebelum merger memiliki rasio sebesar 1,35% di mana nilai rasio ini lebih tinggi 0,55% dari rasio NPF sesudah merger pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021.

Tabel 10. Analisis Sinergi Rasio NPF

Perhitungan Rasio NPF	Sebelum	Sesudah
Pembiayaan(KL, D, M)	1,667,661	1,350,378
Total Pembiayaan	151,861,734	168,913,820
Rasio NPF	1.10%	0.80%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Rasio NPF sebelum merger menghasilkan nilai rasio NPF sebesar 1,10%. Nilai rasio ini lebih tinggi 0,30% dari rasio NPF Bank Syariah Indonesia (BSI) sesudah merger.

Kinerja Keuangan Rentabilitas

Tabel 11. Perhitungan Rasio ROA

Rasio ROA	Sebelum			Sesudah
	BSM 2020	BRIS 2020	BNIS 2020	BSI 2021
Laba Sebelum Pajak	405,231	1,910,976	688,990	4,062,208
Total Aset	57,715,586	126,907,940	55,009,342	265,289,081
Rasio ROA	0.70%	1.51%	1.25%	1.53%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 12. Rekapitulasi Perubahan Rasio ROA

Sebelum Merger	Sesudah Merger(BSI)	Naik/Turun	%
BRIS 1.51%	1.53%	Naik	0,02%
BNIS 1.25%	1.53%	Naik	0,28%
BSM 0.70%	1.53%	Naik	0,83%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Rasio ROA pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2020 sebelum merger sebesar 0,70% di mana nilai rasio ini 0,83% lebih rendah dibandingkan dengan rasio Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021 sesudah merger yaitu sebesar 1,53%.

Sedangkan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) didapatkan perhitungan rasio ROA sebesar 1,51% atau 0,02% lebih rendah dibandingkan rasio ROA Bank Syariah Indonesia (BSI) sesudah merger yaitu sebesar 1,53%.

Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) tahun 2020 sebelum merger memiliki nilai rasio ROA sebesar 1,25% di mana nilai ini 1,25% lebih rendah dibandingkan dengan rasio ROA pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021 sesudah merger. Rasio ROA Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar 1,53% atau 0,28% lebih besar dari rasio Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS).

Tabel 13. Analisis Sinergi Rasio ROA

Perhitungan RasioROA	Sebelum Merger	Sesudah Merger
Laba SebelumPajak	3,005,197	4,062,208
Total Aset	239,632,868	265,289,081
Rasio ROA	1,25%	1,53%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Rasio sebelum merger sebesar 1,25%. Sesudah merger, nilai rasio ROA pada Bank Syariah Indonesia (BSI) meningkat sebanyak 0,28% menjadi 1,53%.

Kinerja Keuangan Likuiditas

Tabel 14. Perhitungan Rasio STM

Rasio STM	Sebelum			Sesudah
	BSM 2020	BRIS 2020	BNIS 2020	BSI 2021
Aset Lancar	10.058.039	5.605.147	2.659.595	25.002.185
Kewajiban Lancar	89.968.330	16.732.338	16.626.895	62.546.509
RasioSTM	11,18%	33,50%	16,00%	39,97%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Tabel 15. Rekapitulasi Perubahan Rasio STM

	Sebelum merger	Sesudah Merger(BSI)	Naik/Turun	%
BRIS	33,50%	39,97%	Naik	6,47%
BNIS	16,00%	39,97%	Naik	23,97%
BSM	11,18%	39,97%	Naik	28,79%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2020 sebelum merger memiliki rasio STM sebesar 11,18% sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki rasio STM sebesar 39,97%. Rasio STM Bank Syariah Mandiri (BSM) sebelum merger mengalami kenaikan sebesar 28,79% menjadi 39,97% sesudah merger tahun 2021.

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) tahun 2020 sebelum merger diperoleh hasil perhitungan rasio STM sebesar 33,50%, hasil rasio ini lebih rendah 6,47% dari rasio STM 39,97% milik Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021 sesudah merger.

Rasio STM sebelum merger milik Bank Negara Indonesia Syariah(BNIS) sebesar 16,00% ini mengalami peningkatan sebesar 23,97% menjadi 39,97% setelah merger Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021.

Tabel 16. Analisis Sinergi Rasio STM

Perhitungan RasioSTM	Sebelum Merger	Sesudah Merger
Aset Lancar	18.332.781	25.002.185
Kewajiban Lancar	123.327.563	62.546.509
Rasio STM	14,86%	39,97%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Rasio STM sebelum merger sebesar 14,86%. Sedangkan nilai rasio STM sesudah merger meningkat sebesar 25,11% menjadi 39,97%.

Pembahasan

Tabel 17. Komposit Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan	Sebelum Merger			Sesudah Merger
	BRIS	BNIS	BSM	BSI
Permodalan (KPMM)	19,04%	21,36%	16,88%	22,09%
Kualitas Aset (NPF)	1,65%	1,35%	0,73%	0,80%
Rentabilitas (ROA)	1,51%	1,25%	0,70%	1,53%
Likuiditas (STM)	33,50%	16,00%	11,18%	39,97%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari sisi permodalan ketika sebelum merger, ketiga bank yang melakukan merger ini telah memiliki permodalan yang sehat dan berada di peringkat 1. Sesudah merger Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki permodalan yang jauh lebih baik yang ditandai dengan adanya peningkatan rasio KPMM.

Kenaikan ini disebabkan oleh modal yang bertambah dan ATMR yang juga bertambah setelah dilakukannya penggabungan ketiga bank syariah. Penggabungan tiga bank syariah ini secara otomatis juga akan menggabungkan modal yang dimiliki.

Selain itu, dari sisi kualitas aset ketiga bank sebelum merger juga telah memiliki kualitas aset yang ditunjukkan pada rasio NPF dengan kategori bank sehat dan nilai rasio yang berada di peringkat 1. Sedangkan sesudah merger, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki kualitas aset atau pembiayaan yang lebih baik daripada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) namun kurang dari kualitas aset yang dimiliki Bank Syariah Mandiri (BSM). Semakin rendah nilai rasio NPF, maka semakin baik kualitas pembiayaan bank syariah tersebut.

Semakin meluasnya jangkauan Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga memiliki jaringan bisnis di seluruh wilayah Indonesia maka akan menambah jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bertambahnya jumlah nasabah ini akan meningkatkan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Semakin bertambah pembiayaan yang dipilih nasabah, semakin besar juga risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi. Namun, bertambahnya jumlah nasabah dan pembiayaan yang dipilih setelah dilakukannya merger tidak menghalangi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memiliki kualitas pembiayaan yang lebih baik dari sebelum merger.

Kemampuan Bank Syariah Indonesia (BSI) sesudah merger dalam menghasilkan laba (rentabilitas) terdapat peningkatan dari sebelum merger menjadi peringkat 1 sebesar 1,53% lebih tinggi dari ketiga bank sebelum merger. Peningkatan ini tidak hanya terjadi karena adanya perluasan pasar dan meningkatnya jumlah nasabah sehingga bank memperoleh laba lebih tinggi dari nasabah, namun juga diakibatkan oleh manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI) yang telah berhasil dalam mengelola aktiva setelah penggabungan sehingga menghasilkan laba yang lebih tinggi.

Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam kemampuannya memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek semakin baik daripada ketika sebelum merger. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio STM Bank Syariah Indonesia (BSI) sesudah merger yang lebih tinggi dari rasio ketiga bank sebelum merger. Peningkatan ini disebabkan sesudah merger aset lancar dan kewajiban lancar pada Bank Syariah Indonesia (BSI) meningkat sehingga nilai rasio STM juga akan meningkat. Hal ini memiliki arti bahwa pelaksanaan merger menghasilkan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Tabel 18. Komposit Analisis Sinergi

	Keterangan	Perubahan			
		Sebelum	Sesudah	Naik/Turun	%
1	KPMM	18.39%	22.09%	Naik	3.70%
2	NPF	1.10%	0.80%	Turun	0.30%
3	ROA	1.25%	1.53%	Naik	0.28%
4	STM	14.86%	39.97%	Naik	25.11%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 18. komposit analisis strategi dapat diketahui bahwa setelah merger Bank BSI rasio KPMM yang lebih tinggi dibandingkan nilai rasio KPMM sebelum merger. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan atau merger yang dilakukan memberi nilai tambah bagi Bank BSI. Nilai rasio NPF mengalami penurunan sebesar 0,30% yang berarti sesudah menjadi Bank BSI dalam penyaluran pembiayaan lebih hati-hati, sehingga pembiayaan macet bisa ditekan. Nilai rasio ROA meningkat setelah merger, yang berarti keuntungan usaha meningkat 0,28% setelah menjadi Bank BSI. Hal ini juga berarti pembiayaan yang disalurkan meningkat sesudah merger maka jumlah laba yang didapatkan juga akan meningkat. Begitu juga dengan rasio STM terdapat peningkatan nilai rasio STM sesudah merger karena aset lancar sesudah merger bertambah sedangkan kewajiban lancar sesudah merger berkurang, sehingga nilai rasio STM sesudah merger lebih tinggi daripada nilai rasio STM sebelum merger, yang berarti Bank BSI mengutamakan pelayanan prima terhadap nasabahnya yang ditunjukkan dengan menjaga rasio likuiditas meningkat.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung teori merger, di mana dengan merger bisa meningkatkan efisiensi usaha dan meningkatkan kinerja keuangan. Temuan ini menepis anggapan tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah merger, seperti yang disampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh I. A. G. K. Dewi & Purnawati (2016).

KESIMPULAN

Kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum merger pada rasio KPMM/permodalan, NPF/kualitas aset, ROA/rentabilitas berjalan dengan baik. Namun, pada rasio STM/likuiditas tergolong kurang baik yaitu pada Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Selain itu, secara keseluruhan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia sesudah merger menjadi sangat baik karena mengalami peningkatan pada seluruh rasio keuangan sehingga proses merger ini berhasil dilakukan.

Implikasi Penelitian

Dampak dari merger ini adalah Indonesia memiliki perbankan syariah yang unggul sehingga akan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia dapat menjadi contoh bagi bank-bank lain yang ingin melakukan merger. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dapat menggunakan rasio keuangan yang lebih bervariasi lagi untuk melengkapi kekurangan hasil penelitian ini.

REFERENSI

- Alpin. (2021). *BRI Syariah Ganti Nama Jadi Bank Syariah Indonesia*. <https://www.radarbogor.id/2021/01/29/bri-syariah-ganti-nama-jadi-bank-syariah-indonesia/>,
Antasari, R. R., & Fauziah. (2018). *Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press.
Bayu, D. (2022). Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>,
Dewi, F. K. (2021). Dampak Merger Bank Syariah Terhadap Perkembangan Perekonomian Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Republika.Co.Id*. <https://retizen.republika.co.id/posts/11165/dampak-merger-bank-syariah-terhadap-perkembangan-perekonomian-syariah-di-masa-pandemi-covid-19>

- Dewi, I. A. G. K., & Purnawati, N. K. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah Akuisisi Pada Bank Sinar Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5((6)), 3504–3531.
- Esterlina, P., & Firdausi, N. N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 47(2), 39–40.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghofur. (2018). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Hartono. (2018). *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS* (Edisi 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Haryanti, C. S. (2015). Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Telekomunikasi (Studi Kasus BEI). *Serat Acitya*, 4(2), 52–86.
- Khoiriyah, S. M. (2021). *Analisis Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Solvabilitas (Study Kasus Bank Central Asia Syariah Periode 2015-2019)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Marcelino, R. (2021). Analisis Merger pada Bank Syariah Indonesia. *Yoursay.Suara.Com*.
<https://yoursay.suara.com/kolom/2021/12/23/122337/analisis-merger-pada-bank-syariah-indonesia>
- Ramadhan, K. D., & Syarfan, L. O. (2016). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Perusahaan Pada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Makin Group) Jambi. *Jurnal Valuta*, 2(2), 190–207.
- Suryawathy, I. G. A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika JINAH*, 3(2), 1123–1133.
- Wardiyah, M. L. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Perbankan Syariah. 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas. 16 Agustus 2007. Lembaran Negara TAHUN 2008 Nomor 106. Jakarta. Kementerian BUMN.

